



# BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 110 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNIKAN  
KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan agar berdaya guna dan berhasil guna terutama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan dinamika, perkembangan dan kemajuan dalam pembangunan di desa, perlu upaya kongkrit Pemerintah Daerah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Desa di Kabupaten Lombok Barat, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu meningkatkan fungsi entitas Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dengan membentuk Desa baru;
- c. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan semangat otonomi Desa maka perlu dilaksanakan pemekaran Desa di Kabupaten Lombok Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Punikan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat 92 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

1

- Lombok Barat No. 162);
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 11);
  11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 12);
  12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
  13. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penataan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 51) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penataan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 90).

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNIKAN KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.



11. Peta Indikatif adalah peta yang menggambarkan keadaan suatu wilayah atau lokasi sebagai informasi awal dari suatu proses kebijakan untuk tujuan tertentu yang bersifat peta sementara dalam menuju proses penetapan peta pasti (definitif).

## BAB II

### PEMBENTUKAN , LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN, DAN PETA WILAYAH

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Desa Persiapan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Desa Persiapan Punikan Pemekaran dari Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar.

#### Bagian Kedua

#### Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Cakupan Wilayah , Batas Wilayah, dan Pusat Pemerintahan

#### Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Punikan mempunyai luas wilayah 280,736 Ha (dua ratus delapan puluh koma tujuh tiga enam hektar ).
- (2) Desa Persiapan Punikan memiliki jumlah penduduk 4.081 (empat ribu delapan puluh satu) jiwa atau 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh ) kepala keluarga.
- (3) Wilayah Desa Persiapan Punikan berasal dari sebagian wilayah Desa Batu Mekar meliputi 4(empat) dusun, Yaitu :
  1. Dusun Punikan Utara
  2. Dusun Punikan Selatan
  3. Dusun Peraba
  4. Dusun Kali Ranget

- (4) Dengan terbentuknya Desa Persiapan Punikan wilayah Desa Batu Mekar dikurangi wilayah Desa Persiapan Punikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Persiapan Punikan mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Batas Utara : Kabupaten Lombok Utara;
  - b. Batas Timur : Desa Buwun Sejati;
  - c. Batas Selatan : Desa Batu Kumbang; dan
  - d. Batas Barat : Desa Batu Mekar dan Desa Persiapan Reban Madani.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Punikan berkedudukan di Dusun Punikan Selatan.

### Bagian Ketiga

#### Peta Wilayah

#### Pasal 4

- (1) Peta indikatif batas wilayah Desa Batu Mekar dan batas wilayah Desa Persiapan Punikan digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta indikatif Desa Persiapan Punikan digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah Desa Persiapan Punikan dilakukan secara kartografis sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah menjadi Desa definitif.

### BAB III

#### PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN

#### Pasal 5

- (1) Pejabat Kepala Desa Persiapan Punikan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat
- (2) Pejabat Kepala Desa Persiapan Punikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

↓

- (3) Masa jabatan penjabat Kepala Desa Persiapan Punikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

#### BAB IV KEWENANGAN DESA PERSIAPAN

##### Pasal 6

- (1) Kewenangan Desa Persiapan Punikan sama dengan Desa Batu Mekar kecuali permasalahan mutasi tanah harus dikoordinasikan dengan desa Batu Mekar dan instansi terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pada Desa Persiapan Punikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Mekar, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan/atau Swadaya Masyarakat.

#### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Penjabat Kepala Desa Persiapan Punikan dan Perangkat Desa Persiapan Punikan melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.



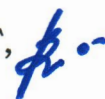
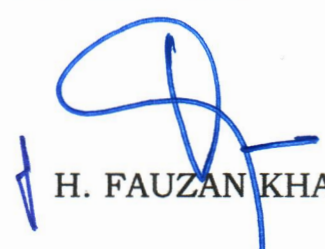
BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

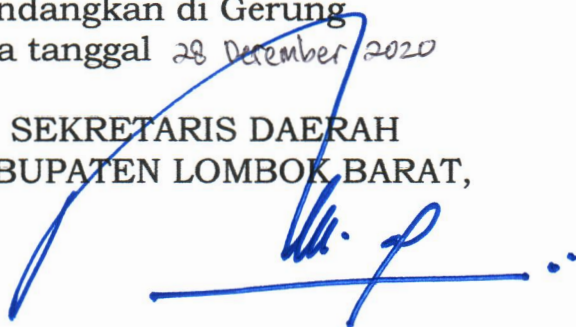
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,   
  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR 110



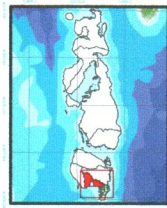
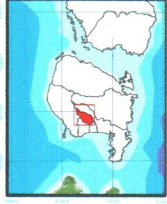
Lampiran I: Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat

Nomor :

Tentang : Pembentukan Desa Persiapan Punikan  
Kecamatan Lingsar  
Kabupaten Lombok Barat



Skala 1:50,467



Kecamatan Sakolong

Kabupaten Lombok Barat

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator Zona 50S

Sistem Grid : Grid Geografi

Datum Horizontal : SRG 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Jl. Soekarno-Hata Giri Menang-Gerung  
Lombok Barat (83363)

Legend

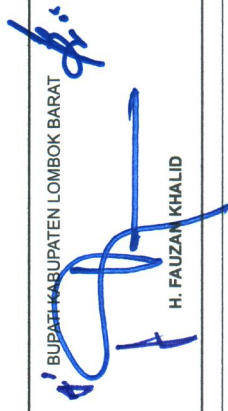
Batas Administrasi Desa

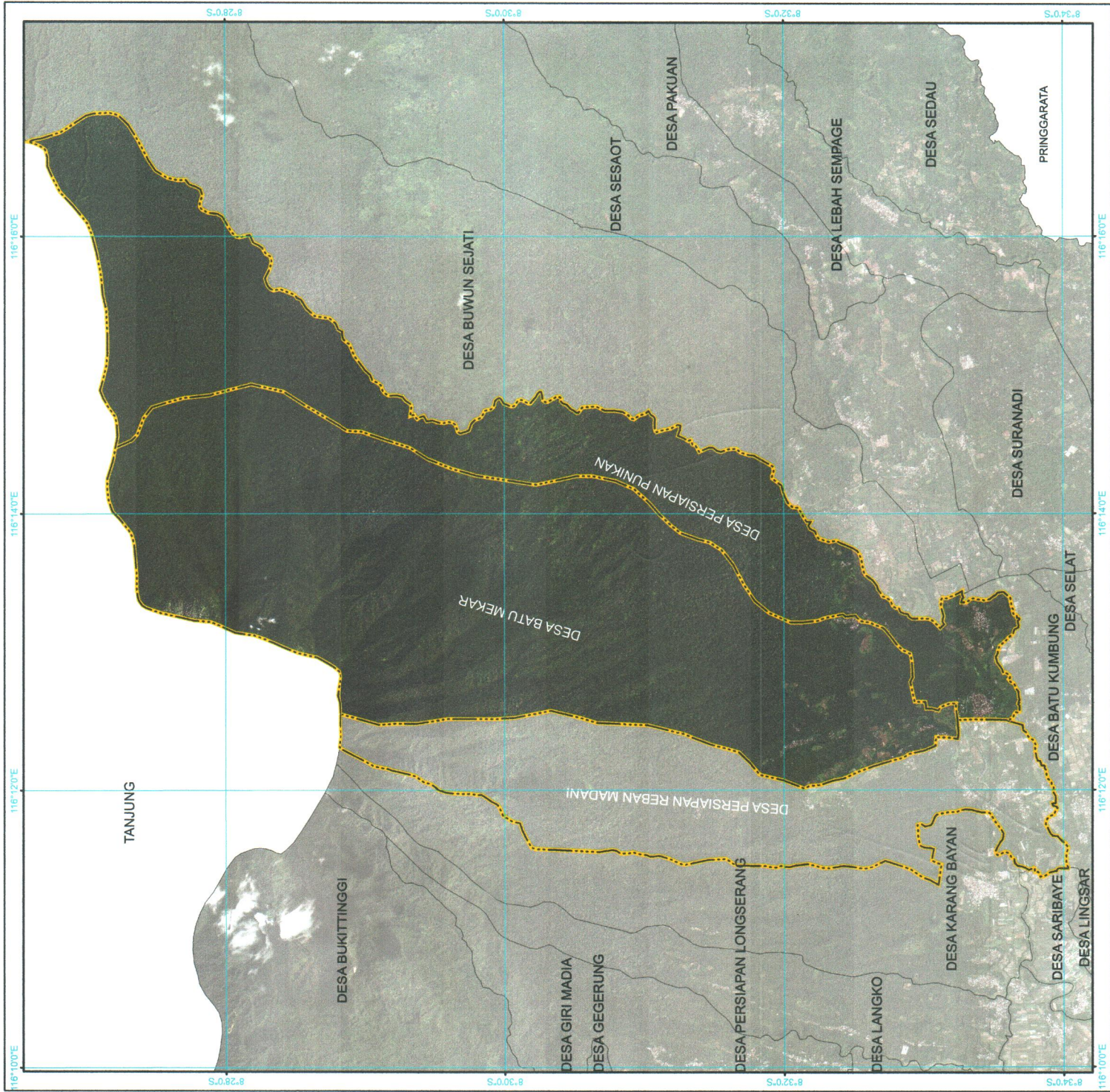
Sumber Data

- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Peta Kesepakatan Batas Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020
- Citra Resolusi Tinggi Pleiades, Resolusi 0,5 Meter
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000
- Toponimi Badan Informasi Geospasial (BIG) edisi Tahun 2020

Riwayat Peta

Draf peta kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi hasil kesepakatan Batas Desa Tahun 2020 yang ditampilkan diatas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades hasil akuisisi 2018

  
BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT  
H. FAUZAN KHALID

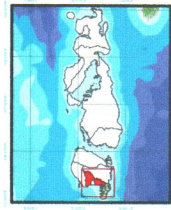
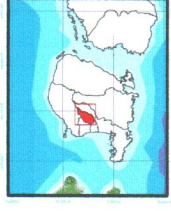


Lampiran II: Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat

Nomor :  
Tentang : Pembentukan Desa Persiapan Punikian Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat



Skala 1:50,467



Kecamatan Sekeloa  
Kabupaten Lombok Barat

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator Zona 50S  
Sistem Grid : Grid Geografi  
Datum Horizontal : SRGI 2013



**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
Jl. Soekarno-Hata Giri Menang-Gerung  
Lombok Barat (8365)

Legend

-----  
Batas Administrasi Desa

**Sumber Data**

- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Peta Kesepakatan Batas Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020
- Citra Resolusi Tinggi Pleiades, Resolusi 0.5 Meter
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000
- Toponimi Badan Informasi Geospasial (BIG) edisi Tahun 2020

**Riwayat Peta**

Draf peta kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi hasil kesepakatan Batas Desa Tahun 2020 yang ditampilkan diatas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades hasil akuisisi 2018

*(Signature)*  
BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

